



ISSN: 1858-2664

Maret 2006, Vol. 2, No. 1

# JURNAL PENYULUHAN

## STRATEGI PENATAAN KAWASAN PETERNAKAN DI KABUPATEN BLITAR

(THE ZONING OF LIVESTOCK AREA STRATEGY IN DISTRICT OF BLITAR )

Eliezer Ginting

### Abstract

*The research result shows that the zoning of KINAK is based on the critical and even less productive field for planting. Furthermore, several factors have significant effect on KINAK arrangement social norm system of the local society as well as general and specific layout plant of Blitar regency. The effort of matching KINAK with the availability of potential circumstance and transportation bring about advantages to marketing crops and climate. There has been no change in location enterprise policy. There were two types of work patterns in terms of social-economy such as horizontal and vertical. Horizontally, the work pattern was created among farmers. Vertically the work pattern was built in such a way that farmers have relation to some local poultry shop and Extension Service who are regarded as technical assistant. In addition to it consequence, the arrangement of KINAK has both increased the number of farmer and poultries being raised, and exceded social stratification that is regarded as social honor by people around KINAK.*

**Key Words:** KINAK, social norm, social stratification, social honor.

### Pendahuluan

Pengembangan peternakan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan undang-undang tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 1967 tentang usaha peternakan yang mengatur ketentuan pokok pengembangan usaha. Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/1990 sebagai salah satu produk deregulasi bidang peternakan.

Paket Kebijakan Deregulasi tanggal 28 Mei 1990 (PAKEM 28/1990) merupakan deregulasi bidang peternakan yakni diterbitkannya Keppres Nomor 22/1990 tentang tatacara Pelaksanaan Usaha Peternakan. Kebijakan deregulasi tersebut merupakan upaya untuk memberikan iklim

dan kepastian usaha serta mendorong agar dapat berkembangnya usaha peternakan rakyat melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Ditinjau dari tipologi usaha peternakan yang berkembang terdapat empat jenis yakni: (1) peternakan sebagai usaha sampingan, (2) peternakan sebagai cabang usaha, (3) Peternakan sebagai usaha pokok, dan (4) Peternakan sebagai usaha industri.

Strategi penataan kawasan industri peternakan rakyat merupakan penterjemahan konsep *social engineering* yang secara eksplisit menekankan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat menghasilkan sesuatu (Hornby, 2000).

Sejalan dengan rencana pembangunan bidang peternakan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 472/Kpts/TN. 330/6/96 tentang pelaksanaan

usaha peternakan ayam ras sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1990. Keputusan ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha ayam ras dan pemerataan berusaha melalui pembinaan yang serasi antara perusahaan peternakan dengan peternakan rakyat dalam bentuk kemitraan.

Kemitraan usaha adalah kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Dispet Dati I, 1999).

Dalam rangka pelaksanaan Keppres No. 22/1990, pemerintah Daerah Tingkat II Blitar melalui Dinas Peternakan Daerah telah mempersiapkan kawasan peternakan ayam. Penataan kawasan tersebut akan membawa perubahan dalam pengaturan lahan dan perilaku sosial ekonomi masyarakat.

Keberhasilan pengembangan komoditas peternakan dalam suatu kawasan tidak dapat terlepas dari pengembangan teknologi. Dalam kaitan ini akan diperlukan suatu penelitian yang diarahkan untuk dapat memberikan informasi dalam menyusun paket kebijaksanaan bagi pengembangan usaha peternakan melalui pengembangan ilmu dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Sudaryanto dan Ahmad (2000), bahwa: pembangunan yang diselenggarakan dengan prinsip berwawasan lingkungan yakni terpeliharanya keseimbangan ekosistem lingkungan alam dan ekosistem lingkungan binaan serta terjaminnya kesediaan sumber-sumber alam dalam menopang kegiatan pembangunan.

Bertitik tolak dengan pernyataan di atas, tampaknya prediksi pengembangan kegiatan usaha peternakan di masa mendatang yang menentukan lahan sebagai basis ekologi yang sesuai dengan perundang-undangan tata ruang daerah. Terkonsentrasinya kegiatan usaha sejenis akan memudahkan pembinaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penyediaan

sarana penunjang secara kolektif menuju efisiensi produktifitas usaha.

### Masalah Penelitian

Dengan demikian maka perumusan masalah yang diajukan adalah (1) Bagaimana strategi pola penataan kawasan industri peternakan (KINAK) di Kabupaten Blitar? (2) Faktor apa yang mempengaruhi strategi penataan KINAK? (3) Bagaimana pola hubungan kerja sosial ekonomi produksi dalam Program KINAK serta konsekuensinya?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan: (1) strategi pola penataan kawasan industri peternakan (KINAK), (2) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penataan KINAK, dan (3) Pola hubungan kerja sosial ekonomi produksi dalam KINAK serta konsekuensinya.

### Metode Penelitian

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sedang proses penelitian dimulai sejak tanggal 15 Nopember 2004 sampai dengan 25 Januari 2005. Pemilihan daerah penelitian didasarkan atas *purposive sampling* yakni dengan pertimbangan bahwa daerah yang terpilih merupakan kawasan KINAK, yang terdapat sejumlah peternak ayam ras yang telah berjalan, tetapi belum memiliki penjamin bibit dan pakan (Pola KINAK Pra).

#### Pengumpulan Data

Telah disebutkan di muka bahwa penelitian ini berusaha untuk memperoleh kejelasan mengenai strategi penataan kawasan industri peternakan. Perhatian penelitian ini lebih ditujukan pada satuan analisis masyarakat tani ternak ayam Pola KINAK Pra yang berada dalam kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan teknik pengambilan data melalui partisipasi observasi. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik salju bergulir sampai dengan fenomena yang diperoleh telah mempunyai kejenuhan. Sedangkan sumber data diperoleh dari informasi kunci yakni petani ternak ayam ras sebanyak 16 orang, ketua kelompok tani ternak ayam ras, petugas Dinas Peternakan 4 orang, Staf perusahaan ayam ras 4 orang serta 4 orang petugas *Poultry Shop*. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif melalui penyusunan *file*, *analytic files*, *field work* dan *memos* (Strauss Corbin, 1999).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Keadaan Umum Penataan Kawasan KINAK**

Penataan kawasan KINAK di Kabupaten Blitar ditentukan atas dasar pertimbangan: (1) Disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah, (2) Dalam jangka waktu minimal 10 tahun mendatang sejak ditetapkannya lokasi KINAK tidak ada perubahan peruntukan lokasi atau dengan perkataan lain kawasan ini tidak digunakan untuk pembangunan sektor lainnya, (3) Tersedia sumber air bersih yang cukup untuk usaha peternakan, (4) Lokasi KINAK disesuaikan dengan potensi yang ada dan kemudahan transportasi dalam pengelolaan maupun dalam pemasaran hasil, (5) Ketinggian dan agroklimat disesuaikan dengan ternak yang dipilih dan (6) Norma sistem sosial masyarakat setempat mendukung adanya lokasi tersebut dalam arti masyarakat sekitar lokasi tidak berkeberatan adanya lokasi peternakan.

#### **Pelaksanaan Kegiatan Penataan KINAK**

Sebagai pelaksanaan upaya penataan kawasan usaha peternakan dengan pola KINAK di Kabupaten Blitar telah dilakukan sejak tahun 1991/1992. Sedangkan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi lokasi dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan Daerah Dati II dengan supervisi Dinas Peternakan Dati I dengan mempertimbangkan kebijaksanaan yang telah ada.
2. Usulan penataan lokasi KINAK disampaikan oleh Dinas Peternakan Dati II dibahas dengan Dinas Peternakan Dati I bersama dengan Bappeda Dati II untuk memperoleh masukan yang berkaitan dengan peruntukan lahan bagi sektor lain.
3. Pembuatan rekapitulasi konsep usulan penataan KINAK dari Dati I sebagai bahan yang akan dibahas di tingkat Provinsi atau Dati I oleh Dinas Peternakan dan Bappeda.
4. Hasil pembahasan pada nomor 3 merupakan konsep usulan kepada gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai masukan dalam rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

Penataan kawasan KINAK di Kabupaten Blitar didasarkan atas pemikiran: (1) Peternak sebagai pelaku usaha yang akan dibina, (2) Ternak sebagai obyek yang akan ditingkatkan produksi dan produktivitasnya, (3) Lahan sebagai basis ekologi budidaya dan pendukung pakan serta, (3) Teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Blitar memutuskan Pola KINAK Pra (Peternakan Rakyat Agribisnis). Dalam model ini usaha peternakan dilaksanakan di setiap dua desa pada setiap kecamatan, dimana terdapat sejumlah peternakan rakyat tetapi belum memiliki penjamin bibit dan pakan sedang perusahaan berfungsi sebagai penghela yang menjamin pemasaran serta menyediakan sarana produksi.

Berdasarkan pelaksanaan penataan KINAK tersebut di atas tampaknya daerah ini telah meregionalkan komoditi ayam ras dengan kebijakan pengembangan industri peternakan. Kondisi ini dikatakan oleh Suprpto dan Rasahan (2000) akan dapat

mengurangi resiko ketidaktentuan permintaan, walaupun secara normatif dapat menimbulkan berbagai aspek keuntungan. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa KINAK merupakan suatu tatanan yang perlu di dukung oleh seperangkat subsistem yang saling terkait yaitu subsistem pembawa masukan, pengelola proses produksi, pengolahan hasil dan informasi (Adjid, 2000). Sedang di sisi lain Rasahan (2000) melihat ruang lingkup pengembangan agribisnis dan agro industri meliputi aspek pengelolaan usaha produk penunjang kegiatan pra dan pasca panen dan aspek sarana tataniaga serta penyuluhan.

Sebagai suatu informasi di Kabupaten Blitar telah terlaksana pola kredit bergulir bantuan presiden dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1993 dan tidak dilanjutkan lagi. Kondisi ini diakibatkan PT. Anputraco Ltd yang bertindak sebagai inti atau bapak angkat menyatakan bangkrut (kolap) dan sebagian peternak masih belum menerima haknya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Strategi penataan kawasan KINAK di daerah Tingkat Kabupaten Blitar bertujuan untuk mewujudkan suatu kawasan yang didalamnya berdiri berbagai usaha peternakan yang saling terkait dan terpadu yang diharapkan dapat menghasilkan produk peternakan secara efisien dan efektif secara terus menerus. Sejalan dengan hal ini maka di Kabupaten Blitar kawasan KINAK diarahkan untuk menempati lahan-lahan kritis, seperti areal berpasir, bekas aliran lahar gunung kelud dan kantong-kantong lahar serta tanah berbatu kapur yang tidak produktif untuk tanaman pangan.

Dalam mewujudkan pemetaan KINAK yang telah direkomendasikan Bappeda Tingkat II Kabupaten Blitar, dipakai sebagai acuan dalam proses penerbitan perizinan bagi usaha di bidang peternakan di samping rencana tata ruang daerah yang telah ada. Berdasarkan acuan ini maka kawasan dipilih wilayah Blitar Selatan yang meliputi: Kecamatan Kanigoro, Kademangan, Sutojayan, Binangun, Bakung, Panggungrejo, Wates dan Srengat. Dari kawasan ini terdapat

dua kecamatan yang belum memiliki peternakan ayam ras yakni Binangun dan Wates.

#### Kecadaan Umum Kecamatan Srengat

Kecamatan Srengat terletak di sebelah Selatan Kabupaten Blitar, sedang jarak Ibu Kota kecamatan dengan Kotamadya Blitar lebih kurang 15 km. Distribusi penduduk Kecamatan Kanigoro pada tahun 1995 adalah sebagai berikut: umur dewasa 26.965 orang laki-laki, 27.434 orang perempuan, anak laki-laki 26.976 orang dan anak perempuan 27.443 orang. Luas wilayah 53,98 km<sup>2</sup> sedang kepadatan penduduk 1.008 per km<sup>2</sup>, penggunaan lahan untuk sawah sebesar 668 ha, tegal 2.814 ha, pekarangan 452 ha, lainnya 465 ha dengan demikian luas lahan yang telah digunakan sebesar 3.226 ha. Populasi ternak ayam ras 1.306.100 ekor, ayam buras 66.350 ekor, itik manila 7.485 ekor dan entok 570 ekor (Dispet Tk II Blitar, 2004).

Mata pencaharian penduduk terbanyak adalah dalam sektor pertanian yakni 83,45%, dan 12% sebagai pegawai pemerintah dan swasta, selebihnya bergerak dalam bidang jasa dan pedagang kecil. Pada saat penelitian ini dilakukan terlihat gambaran struktur agraris yang menekankan pada bentuk hubungan sosial ekonomi antara petani kaya dan petani lahan sempit dan buruh tani.

Masyarakat menjalin berbagai pola hubungan dan interaksi satu dengan yang lainnya, hubungan yang paling kuat mewarnai pola agraris adalah bentuk-bentuk persekutuan dan kerjasama, persaingan dan diferensial peran dari masing-masing lapisan masyarakat. Secara umum lapisan elit desa menguasai sumber-sumber produksi utama desa, seperti tanah, kelembagaan ekonomi, modal dan kesempatan untuk menangkap kemudahan program yang masuk ke wilayah tersebut. Jumlah mereka kecil tetapi mempunyai pengaruh yang menentukan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Lapisan elit ini ternyata merupakan simpul-simpul kekerabatan dan berintegrasi satu dengan lainnya terutama dalam usaha ayam ras petelur. Sedang lapisan bawah bekerja sebagai

buruh tani atau ternak lebih kompak dalam menghadapi kehidupan sehari-hari terutama dalam penetapan besarnya upah.

Transportasi yang lancar dari Kecamatan Srengat ke Blitar mendorong angkatan kerja muda untuk mencari pekerjaan di luar kecamatan terutama di Blitar, Malang dan Surabaya. Mereka bekerja sebagai migran sirkuler dan biasanya kembali setiap hari Sabtu untuk berkumpul bersama keluarganya. Pekerjaan yang banyak digumuli oleh para migran ini adalah pekerjaan memburuh di sektor industri dan sektor non formal.

#### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Penataan KINAK

Pembinaan usaha peternakan ayam ras di Kecamatan Srengat mengacu pada Undang-undang Kehewan No. 6 tahun 1967 dan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 tahun 1990 maka di kecamatan ini telah dilaksanakan: (i) Usaha budidaya ayam ras pedaging sebagai usaha untuk memproduksi hasil ayam ras dan hasil ikutannya bagi konsumen, (ii) Usaha ayam ras petelur adalah usaha untuk memproduksi hasil ayam ras petelur dan hasil ikutannya bagi konsumen, (iii) Usaha kecil peternakan ayam ras adalah usaha budidaya ayam ras yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 65.000 ekor ayam ras pedaging per siklus atau 45.000 ekor induk ayam ras petelur, (iv) Peternakan ayam ras adalah usaha kecil yang jumlahnya tidak melebihi 15.000 ekor pedaging per siklus atau 10.000 ekor induk ayam ras petelur.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Keppres No. 22 tahun 1990 tersebut di kecamatan ini akan direncanakan adanya kemitraan yang merupakan kerjasama bidang usaha budidaya ayam ras antara peternakan rakyat ayam ras dengan perusahaan peternakan dan atau perusahaan di bidang peternakan. Sedang perusahaan inti adalah perusahaan peternakan yang mengadakan kemitraan dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR) yang berkewajiban menyediakan lahan sarana produksi, bimbingan teknis,

manajemen, menampung mengolah dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat ayam ras.

Dari hasil temuan penelitian di Kecamatan Srengat tampaknya para petani ayam ras petelur mengikuti model Pola KINAK Pra yakni bekerjasama dengan *Poultry Shop* sebagai suatu perusahaan penghela yang berkewajiban melakukan bimbingan teknis, menampung dan memasarkan hasil produksi namun tidak megusahakan permodalan dan tidak melaksanakan budidaya ayam ras. Namun demikian pihak *Poultry Shop* memberikan kemudahan kredit produksi dalam bentuk anak ayam, pakan dan obat-obatan yang akan dibayar peternak melalui penjualan telur dan ayam afkir.

Berdasarkan strategi penataan wilayah maka penentuan kawasan KINAK di Kecamatan Srengat adalah: (i) Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, (ii) Lokasi KINAK disesuaikan dengan potensi yang ada dan kemudahan transportasi dalam pengelolaan maupun dalam pemasaran hasil, (iii) Norma sistem sosial masyarakat setempat mendukung adanya lokasi tersebut.

#### Pola Hubungan Sosial Ekonomi

Hubungan sosial ekonomi produksi dalam usaha ayam ras di Kecamatan Srengat berawal dari penerimaan KINAK oleh masyarakat, dan terwujudnya kelompok peternak sebagai wadah belajar, ekonomi dan pemecahan masalah yang disebut sebagai hubungan horisontal. Selanjutnya para peternak menjalin hubungan dengan perusahaan penghela *Poultry Shop* yang berfungsi sebagai penyedia sarana produksi. Sedang Pemerintah Daerah dan Dinas Peternakan berperan sebagai pengambil keputusan untuk menetapkan Pola KINAK Pra (Peternak Agribisnis) dan disebut sebagai hubungan vertikal.

### Konsekuensi Penataan KINAK

Sejak dikeluarkannya Keppres No. 22 tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 4723/Kpts/TN.330/6/1996 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam ras, tampaknya KINAK di Kecamatan Srengat telah berkembang yang ditandai dengan jumlah peternak dan jumlah ayam yang diusahakannya. Ternyata dari data yang diperoleh penguasaan minimal sebesar 2000 ekor dan maksimal 90.000 ekor. Hal ini menunjukkan KINAK di wilayah tersebut telah berkembang dari tahun ke tahun sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar.

Kondisi sosial ekonomi peternak dengan memelihara ayam ras petelur telah memberikan sumbangan bagi penilaian relatif atas kehormatan sosial mereka: bahwa tinggi rendahnya kelas ekonomi peternak akan mempengaruhi tinggi rendahnya kehormatan sosialnya.

Pengaruh akses sosial ekonomi lebih lanjut memasuki berbagai kawasan atau dimensi kehidupan peternak dan memberikan makna sebagai latar belakang untuk menerima kehadiran KINAK dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

### Kesimpulan

Hasil temuan lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi penataan KINAK di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditujukan untuk memanfaatkan lahan kritis seperti tanah berkapur, aliran lahar gunung kelud dan tidak produktif untuk tanaman pertanian.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan KINAK adalah: Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, norma sistem sosial masyarakat setempat mendukung adanya KINAK, disesuaikan dengan potensi dan kemudahan transportasi dalam pengelolaan serta pemasaran, agroklimat yang mendukung

dan minimal 10 tahun tidak ada perubahan lokasi usaha.

3. Jalinan kerjasama telah dilakukan dengan Pola KINAK Pra yang disebut sebagai peternakan rakyat agribisnis, dimana terdapat sejumlah peternakan rakyat bekerjasama dengan pihak *Poultry Shop* yang berfungsi sebagai penghela dalam penyedia sarana produksi dan pemasaran.

### Rujukan

- Adjid, D. A. 2000. *Peranan Penyuluhan Pertanian Dalam Diversifikasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 1999. *Penataan Kawasan Usaha Peternakan*. Surabaya: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
- Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. 2004. *Laporan Tahunan*.
- Hornby, A. S. 2000. "Observation on the Political Economics of Regulation". *AJAE*, Vol 61. No. 4, Part 2. Nov. 391-392.
- Sudaryanto, S. dan Ahmad, S. 2000. *Kebijaksanaan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Gramedia.
- Suprpto, A. dan Rasahan C. A. 2000. *Keunggulan Komparatif dan Pembangunan Pertanian Regional*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Strauss, A. and Corbin, J. 1999. *Basic of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*. London: Sage Publication.